

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PEMBELIAN BERBASIS ERP DALAM Mendukung PENGENDALIAN
INTERNAL (STUDI KASUS PT X)**

Sa'adatud Daroini

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
23013010100@student.upnjatim.ac.id

Tantina Haryati

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

This study examines the implementation of an ERP-based purchasing accounting Information system at the purchasing unit of PT X and its role in supporting internal control. The study employs a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through direct observation during an internship period from January to May 2025 and interviews with the Purchasing Unit Manager. The findings reveal that PT X operates its purchasing process through an integrated ERP system, covering the entire cycle from purchase requisition to vendor payment, Involving multiple units with distinct roles and authorities at each stage. In practice, several administrative procedures still rely on physical documents, including vendor invoices, delivery notes, material receipts, and manually signed approval documents. This hybrid condition does not stem from system limitations, but rather reflects a rational adjustment to external contingencies, particularly vendors not yet integrated into the ERP, as well as the continued need for physical evidence in audit, tax verification, and external examination. Reviewed through the COSO (2013) internal control framework and interpreted through contingency theory and agency theory, all five components of internal control are found to be fulfilled through the combination of the ERP system and physical documents, indicating that internal control effectiveness is determined not only by the degree of digitalization, but also by the consistency of users in executing procedures across both digital and physical channels.

Keywords: *Accounting Information System; Purchasing; Enterprise Resource Planning (ERP); Internal Control; Hybrid System.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis ERP pada unit purchasing PT X serta perannya dalam mendukung pengendalian internal perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang pada periode Januari hingga Mei 2025 dan wawancara dengan Unit Manager Purchasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelian PT X berjalan melalui alur yang terintegrasi dalam sistem ERP, mencakup seluruh siklus

dari pengajuan kebutuhan barang hingga pembayaran kepada vendor, dengan melibatkan beberapa unit yang memiliki peran dan kewenangan berbeda di setiap tahapannya. Dalam praktiknya, beberapa prosedur administrasi masih menggunakan dokumen fisik, seperti invoice vendor, surat jalan, material receipt, dan dokumen persetujuan yang ditandatangani secara manual. Kondisi hybrid ini bukan disebabkan oleh keterbatasan sistem, melainkan merupakan bentuk penyesuaian rasional terhadap kontingensi ekternal, terutama vendor yang belum terintegrasi dengan ERP, serta kebutuhan akan bukti fisik untuk kepentingan audit, pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan eksterial. Ditinjau melalui kerangka pengendalian internal CO50 (2013) dan dimaknai melalui contingency theory dan agency theory, kelima komponen pengendalian internal terpenuhi melalui kombinasi sistem ERP dan dokumen fisik, sehingga efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh tingkat digitalisasi sistem, tetapi juga oleh konsistensi pengguna dalam menjalankan prosedur di kedua sisi, baik digital maupun fisik.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Akuntansi; Pembelian; Enterprise Resource Planning (ERP); Pengendalian Internal; Sistem Hybrid.*

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan yang memiliki aktivitas pembelian tinggi memerlukan sistem pencatatan yang mampu mengelola informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi antarunit kerja. Apabila proses pengelolaan transaksi masih dilakukan secara terpisah tanpa dukungan basis data yang terpusat, risiko terjadinya ketidaksesuaian informasi antarbagian meningkat dan proses persetujuan transaksi menjadi kurang efisien. Kebutuhan akan integrasi informasi mendorong perusahaan untuk menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP) yang mampu menyatukan seluruh informasi data transaksi dalam satu platform terpadu. Rahmawati & Yustian (2022) menyatakan bahwa penerapan ERP mampu meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi melalui integrasi data dan efisiensi proses bisnis. Namun, Ammar (2025) menekankan bahwa keberhasilan penerapan ERP bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kemampuan organisasi menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnisnya. Sejalan dengan itu, Alshaiti (2023) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan sistem informasi pembelian berbasis ERP, tetapi sebagian besar berfokus pada tahap implementasi atau pengaruh sistem terhadap kinerja organisasi secara umum. Menurut Pahutar & Sari (2025), integrasi sistem ERP ke dalam proses pembelian memungkinkan perusahaan untuk mengelola purchase order dan dokumen pembayaran pemasok dengan lebih terstruktur. Fitriani, Mahsina, & Rahman (2022) mencatat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis ERP tidak selalu berjalan dengan lancar karena masih adanya kelemahan pada sistem maupun pengendalian internal di lapangan. Penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana sistem ERP beroperasi dalam siklus pengadaan barang sehari-hari, mulai dari alur

dokumen, persetujuan berjenjang, hingga seleksi pemasok yang dikaitkan dengan kerangka pengendalian internal COSO masih terbatas. Terlebih, penelitian yang secara khusus membahas bagaimana perusahaan menghadapi suatu sistem ERP berjalan bersamaan dengan dokumen fisik dalam satu proses pembelian masih terbatas, termasuk kajian mengenai dampaknya terhadap efektivitas pengendalian internal.

PT X merupakan perusahaan yang tergabung dalam salah satu grup industri nasional yang telah menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi diseluruh departemen perusahaan, terutama pada unit purchasing. Namun dalam praktiknya, beberapa prosedur administrasi masih menggunakan dokumen fisik untuk verifikasi dan otorisasi transaksi, seperti invoice vendor, surat jalan, material receipt, dan dokumen persetujuan berjenjang yang ditandatangani secara manual. Kondisi hybrid ini bukan sekedar kelemahan teknis, melainkan bagian dari cara kerja sistem pembelian PT X yang melibatkan pihak eksternal seperti vendor yang belum terhubung dengan ERP perusahaan.

Kondisi ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana ERP berfungsi dalam mendukung proses pengadaan pada unit purchasing PT X, bagaimana sistem digital dan dokumen fisik berjalan secara berdampingan dalam satu alur yang sama, serta bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi pengendalian internal perusahaan..

B. KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Akuntansi Pembelian

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data transaksi menjadi informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi (Hall, 2008). Romney, Steintbart, Summers, & Wood (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang efektif dapat mendukung seluruh siklus transaksi perusahaan secara terintegrasi, mulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, hingga siklus pembelian yang melibatkan banyak pihak dan dokumen. Sistem informasi akuntansi pembelian berperan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa kepada pemasok.

Sistem informasi akuntansi pembelian melibatkan sejumlah proses, mulai dari permintaan pembelian, pembuatan order pembelian, penerimaan barang sampai dengan pembayaran vendor. Menurut Najwa et al. (2025), penerapan prosedur pembelian yang terstruktur dalam sistem informasi akuntansi dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal sekaligus meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan pada setiap tahapan transaksi. Selain itu, kualitas informasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem secara tepat (Rapina & Mustamin, 2024).

Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem yang berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh data transaksi dalam satu platform terpadu. Ammar (2025) menegaskan bahwa implementasi ERP

sebenarnya menghasilkan dua pendekatan yang saling bertentangan, yaitu pendekatan teknis yang berfokus pada keamanan sistem dan pendekatan operasional yang berfokus pada efisiensi. Sistem dapat beroperasi secara optimal jika perusahaan mampu menemukan keseimbangan di antara keduanya. Alshaiti (2023) menambahkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat berfungsi sebagai alat pencatatan sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian internal terhadap kinerja organisasi.

Grand Theory: Contingency Theory dan Agency Theory

Contingency theory berangkat dari premis bahwa tidak terdapat satu bentuk sistem akuntansi atau sistem pengendalian manajemen yang bersifat universal dan berlaku optimal bagi seluruh organisasi dalam segala kondisi (Otley, 1980). Efektivitas suatu sistem sangat ditentukan oleh kesesuaian (fit) antara rancangan sistem dengan faktor kontingensi yang melingkupinya, seperti lingkungan eksternal, teknologi, struktur, ukuran, dan strategi organisasi (Chenhall, 2003). Dalam konteks penelitian ini, teori kontingensi digunakan untuk menjelaskan mengapa PT X tidak sepenuhnya mendigitalisasi seluruh prosedur pembeliannya. Ketergantungan pada dokumen fisik bukan kegagalan implementasi ERP, melainkan respons yang rasional terhadap faktor kontingensi eksternal, yaitu belum terintegrasinya sebagian vendor ke dalam sistem ERP perusahaan, serta kebutuhan regulasi seperti audit dan pemeriksaan pajak yang masih mensyaratkan bukti fisik.

Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian, seperti pemantauan (monitoring) dan pengikatan (bonding) (Eisenhardt, 1989). Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa mekanisme seperti persetujuan berjenjang, pemisahan tugas, dan penggunaan dokumen pendukung berperan dalam menjaga akuntabilitas serta mendukung efektivitas pengendalian internal.

Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer. Contingency theory menjelaskan alasan penerapan sistem pembelian yang bersifat hybrid, sedangkan agency theory menjelaskan bagaimana mekanisme pengendalian dalam sistem tersebut mampu menjaga efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, kedua teori menjadi landasan dalam menganalisis hasil penelitian

Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian internal ini memiliki lima komponen, meliputi lingkungan pengendalian yang membentuk budaya dan nilai organisasi, penilaian risiko yang mengidentifikasi yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi, aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko, informasi dan komunikasi untuk memastikan data yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, serta pemantauan untuk menilai apakah pengendalian yang ada berjalan efektif dari waktu ke waktu (COSO, 2013). Penggunaan kerangka kerja COSO menekankan pentingnya pemisahan tugas dan otorisasi pada setiap tahap proses operasional (Virgantara & Lisdiono, 2025).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus untuk menganalisis ERP dioperasikan dalam siklus pembelian secara nyata dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian internal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam kondisi nyata, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Subakti et al., 2023). Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian yaitu unit purchasing PT X. Nama perusahaan disamarkan atas permintaan pihak manajemen untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi selama pelaksanaan magang serta wawancara dengan Unit Manager Purchasing sebagai informan utama yang memahami keseluruhan proses administrasi pembelian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pembelian serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan memanfaatkan pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai acuan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.

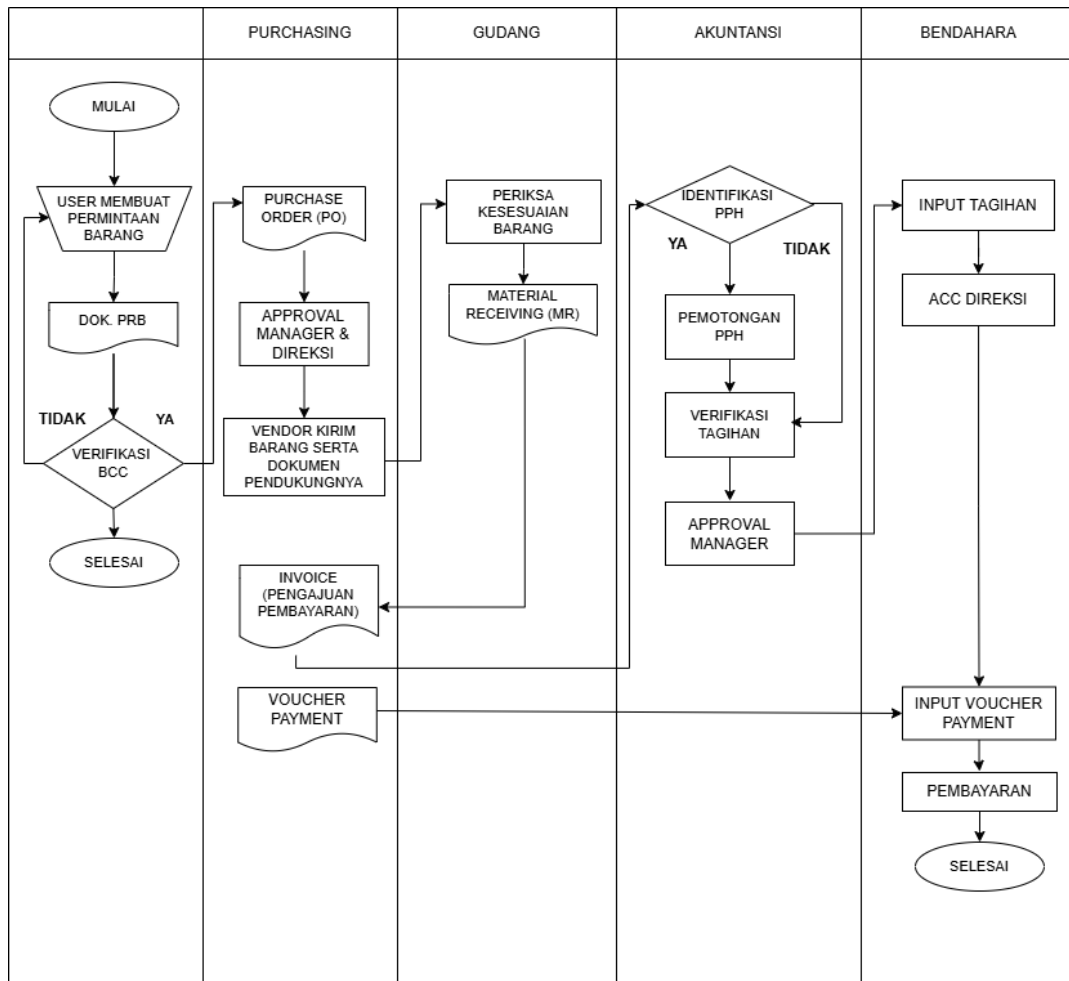
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan hasil analisis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis ERP pada unit purchasing PT X beserta implikasinya terhadap pengendalian internal perusahaan. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang dan wawancara dengan Unit Manager Purchasing dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2026. Hasil pembahasan mencakup uraian alur proses pembelian berbasis ERP yang diterapkan PT X, kondisi hybrid antara sistem digital dan dokumen fisik yang berlangsung dalam praktik, analisis peran ERP dalam mendukung pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO (2013).

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Berbasis ERP di PT X

PT X menerapkan sistem ERP yang dikembangkan secara internal oleh vendor teknologi informasi eksternal dan diintegrasikan ke seluruh departemen perusahaan, termasuk unit purchasing. Berbeda dengan sistem ERP komersial seperti SAP atau Oracle, ERP PT X dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan proses bisnis perusahaan secara spesifik, sehingga alur transaksi yang berjalan di dalamnya mencerminkan prosedur operasional yang berlaku di lapangan.

Alur proses pembelian yang diterapkan PT X dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur proses pembelian yang diterapkan PT X

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Proses dimulai dari pengajuan kebutuhan barang oleh unit pengguna melalui dokumen Purchase Requisition (PRB) yang diinput ke dalam sistem ERP. PRB kemudian diverifikasi oleh Budget Control Center (BCC) untuk memastikan ketersediaan anggaran sebelum proses dilanjutkan. Apabila pengajuan belum memperoleh persetujuan, dokumen dikembalikan kepada pengguna untuk diperbaiki atau diajukan ulang. Apabila disetujui, PRB diteruskan ke unit purchasing untuk diterbitkan menjadi Purchase Order (PO) melalui sistem ERP

Setelah PO diterbitkan, dokumen tersebut melalui tahap persetujuan berjenjang sesuai nilai transaksi sebelum dikirimkan kepada vendor sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang. Vendor kemudian mengirimkan barang beserta dokumen pendukung berupa invoice/kwitansi dan surat jalan. Bagian gudang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dengan PO dan menerbitkan Material Receipt (MR) sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya unit purchasing menyusun invoice pengajuan pembayaran melalui ERP dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Unit akuntansi melakukan verifikasi dengan mencocokkan seluruh dokumen pembelian, bukti penerimaan barang, dan tagihan

yang diajukan, termasuk identifikasi kewajiban perpajakan apabila transaksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Setelah tagihan dinyatakan *complete*, unit purchasing membuat voucher payment dan dokumen diteruskan kepada bendahara untuk melakukan pembayaran kepada vendor. Rangkaian alur ini menunjukkan bahwa proses pembelian PT X melibatkan banyak pihak dan tahapan yang saling bergantung, namun dalam praktiknya tidak seluruh tahapan berjalan sepenuhnya melalui sistem digital.

Kondisi Hybrid dalam Implementasi ERP dan Penggunaan Dokumen Fisik

Meskipun PT X telah menerapkan ERP secara terintegrasi, sebagian prosedur administrasi pembelian masih menggunakan dokumen fisik. Invoice vendor dan surat jalan diterima dalam bentuk fisik dari vendor pada tahap pengiriman barang, MR diterbitkan secara fisik oleh bagian gudang sebagai bukti penerimaan, serta dokumen persetujuan berjenjang masih ditandatangani secara manual sebelum diarsipkan. Kondisi ini terjadi karena vendor eksternal belum seluruhnya terhubung dengan sistem ERP perusahaan, sehingga dokumen pendukung pengiriman masih diterbitkan dalam bentuk fisik. Selain itu, dokumen fisik dipertahankan sebagai bukti otentik yang dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi di lapangan, pemeriksaan pajak, serta audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kebutuhan ini bersifat fungsional, sehingga dokumen fisik akan tetap digunakan bahkan apabila proses digitalisasi persetujuan telah sepenuhnya diimplementasikan.

Dari perspektif contingency theory, kondisi ini menegaskan bahwa rancangan sistem pembelian PT X telah menyesuaikan diri dengan faktor kontingensi eksternal yang berada di luar kendali langsung perusahaan, alih-alih memaksakan digitalisasi penuh yang mengabaikan realitas kesiapan mitra bisnisnya (Chenhall, 2003). Keberadaan dokumen fisik di satu sisi memperkuat pengendalian karena memberikan lapisan verifikasi tambahan berupa tanda tangan basah dan cap stempel yang sulit dimanipulasi dibandingkan data digital semata. Di sisi lain, penggunaan dokumen fisik secara paralel dengan ERP berpotensi memperlambat proses administrasi, membuka peluang dokumen tertinggal atau hilang sebelum sempat diinput ke dalam sistem, serta menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara data di ERP dan kondisi dokumen fisik di lapangan apabila proses input tidak dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fitriani et al. (2022) yang mencatat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis ERP tidak selalu berjalan mulus karena masih adanya kelemahan pada sistem maupun pengendalian internal di lapangan.

Rekonsiliasi antara data ERP dan dokumen fisik dilakukan oleh unit akuntansi melalui pengecekan dan pencocokan dokumen sebelum tagihan dinyatakan *complete*. Apabila terdapat ketidaksesuaian, transaksi tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sebelum perbedaan tersebut diselesaikan. Kondisi hybrid ini menunjukkan bahwa sistem digital dan dokumen fisik tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam satu alur pembelian yang sama. Kondisi inilah yang menjadi dasar analisis pengendalian internal pada bagian berikutnya.

Peran ERP dalam Mendukung Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada unit purchasing PT X tidak dapat dipisahkan dari kondisi hybrid yang telah diuraikan sebelumnya. Sebelum membahas lima

komponen COSO satu per satu, kondisi hybrid tersebut pertama-tama perlu dipahami sebagai bentuk fit organisasi terhadap kontingensi eksternalnya (Otley, 1980), sekaligus sebagai rangkaian mekanisme monitoring dan bonding dalam kerangka agency theory (Jensen & Meckling, 1976). Kombinasi ERP dan dokumen fisik bukan dua sistem yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan strategi pengendalian yang lahir dari upaya PT X menyeimbangkan efisiensi digital dengan kebutuhan akuntabilitas formal terhadap pihak eksternal yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem. Apabila ditinjau melalui lima komponen pengendalian internal menurut COSO, terlihat bahwa setiap komponen tidak hanya didukung oleh sistem ERP, tetapi juga oleh dokumen fisik yang berjalan secara paralel.

Pada komponen lingkungan pengendalian, ERP membentuk budaya kerja yang tertib administrasi karena setiap pengguna memiliki hak akses dan kewenangan yang berbeda sesuai posisinya, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kepada pihak yang bertanggung jawab. Pada saat yang sama, dokumen fisik yang ditandatangani secara manual memperkuat akuntabilitas karena jejak persetujuan tidak hanya tersimpan di sistem, tetapi juga terdokumentasi secara fisik sebagai bukti yang dapat diverifikasi secara langsung. Dari perspektif agency theory, hak akses berjenjang tersebut berfungsi mempersempit ruang bagi perilaku oportunistik agen karena setiap tindakan tercatat dan dapat ditelusuri kembali (*accountability trail*) tanpa mekanisme ini, asimetri informasi antara manajemen dan staf operasional berpotensi disalahgunakan, misalnya melalui pengajuan transaksi fiktif yang sulit dideteksi. Tanda tangan fisik menjadi lapisan bonding tambahan yang secara hukum lebih mudah dipertanggungjawabkan dibandingkan jejak digital semata, terutama ketika berhadapan dengan pihak eksternal seperti vendor yang berada di luar kendali langsung sistem ERP perusahaan.

Komponen aktivitas pengendalian tampak paling jelas pada penerapan persetujuan berjenjang berdasarkan nilai transaksi untuk PRB, PO, dan PPL. Penerapan ini sejalan dengan Virgantara & Lisdiono (2025) yang menekankan pentingnya pemisahan tugas dan otorisasi pada setiap tahap proses operasional. Dalam kondisi hybrid, persetujuan transaksi masih dilakukan melalui tanda tangan basah pada dokumen fisik yang dicetak. Perusahaan telah mempertimbangkan digitalisasi proses persetujuan, namun hingga saat penelitian dilakukan hal tersebut masih dalam tahap konsultasi dan belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Pemisahan tugas antarunit, mulai dari pengguna, purchasing, gudang, akuntansi, hingga bendahara, memastikan tidak ada satu pihak yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan transaksi sekaligus, baik di sistem maupun di dokumen fisik. Dari sudut pandang agency theory, pemisahan tugas ini merupakan mekanisme bonding klasik yang membatasi peluang kolusi antaragen karena setiap tahap memerlukan persetujuan pihak lain yang independen, sementara ditinjau dari contingency theory keputusan untuk belum sepenuhnya mendigitalisasi tanda tangan mencerminkan kehati-hatian organisasi dalam menyesuaikan kecepatan transformasi digital dengan kesiapan infrastruktur hukum dan budaya kerja internal, bukan semata keterlambatan teknologi.

Pada komponen informasi dan komunikasi, ERP memungkinkan seluruh unit mengakses data transaksi yang sama secara real time. Pahutar & Sari (2025)

menyatakan bahwa penerapan sistem informasi pembelian berbasis ERP dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan purchase order dan dokumen pembayaran sehingga proses transaksi dapat ditelusuri dengan mudah. Namun dalam kondisi hybrid, informasi yang tersedia di ERP baru dapat dinyatakan lengkap setelah dokumen fisik dari vendor diterima, diverifikasi, dan datanya diinput ke dalam sistem. Artinya, kelengkapan informasi di ERP bergantung pada kedisiplinan pengguna dalam menginput data dari dokumen fisik secara tepat waktu. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam kerangka agency theory, ERP semata belum cukup menjamin tidak adanya asimetri informasi apabila input datanya masih bergantung pada kepatuhan individu, oleh karena itu diperlukan lapisan verifikasi tambahan pada tahap rekonsiliasi, sebagaimana diuraikan pada komponen pemantauan berikut.

Tabel 1. Keterkaitan antara Implementasi ERP dan Peran Dokumen Fisik pada Tiap Komponen COSO

Komponen COSO	Implementasi ERP	Peran Dokumen Fisik
Lingkungan Pengendalian	Akses sistem disesuaikan dengan posisi pengguna	Tanda tangan sebagai bukti akuntabilitas
Penilaian Risiko	Verifikasi anggaran BCC	Dokumen PRB dikembalikan manual
Aktivitas Pengendalian	Persetujuan berjenjang PRB/PO/Invoice	Tanda tangan basah di dokumen persetujuan
Informasi & Komunikasi	Akses data <i>real time</i> lintas unit	Dokumen fisik vendor sebagai sumber input
Pemantauan	Tracking status dokumen di ERP	Rekonsiliasi fisik oleh unit akuntansi

Komponen pemantauan tercermin dari kemampuan ERP merekam status setiap dokumen, mulai dari PRB, PO, hingga voucher payment, sehingga manajemen dapat mengidentifikasi keterlambatan pada salah satu tahapan persetujuan. Dalam konteks hybrid, pemantauan yang efektif mensyaratkan bahwa status di ERP mencerminkan kondisi dokumen fisik yang sebenarnya. Oleh karena itu, tahap pengecekan oleh unit akuntansi menjadi titik kontrol yang krusial, karena di sinilah konsistensi antara data digital dan dokumen fisik diverifikasi secara langsung. Titik kontrol ini dapat dipahami sebagai mekanisme monitoring inti dalam kerangka agency theory, karena di sanalah unit akuntansi sebagai pihak yang independen dari purchasing dan gudang untuk memverifikasi bahwa representasi digital transaksi benar-benar sesuai dengan kondisi fisiknya, sehingga potensi manipulasi atau kesalahan pencatatan dapat dideteksi sebelum pembayaran dilakukan. Ringkasan keterkaitan antara implementasi ERP dan peran dokumen fisik pada tiap komponen COSO dapat dilihat pada Tabel 1.

Secara keseluruhan, kelima komponen COSO menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal di PT X tidak ditentukan oleh ERP semata, melainkan oleh bagaimana sistem digital dan dokumen fisik bekerja secara bersama-sama dalam satu alur yang saling bergantung. Temuan ini sejalan dengan Alshaiti (2023) bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat memperkuat

efektivitas pengendalian internal, dengan catatan bahwa integrasi yang dimaksud dalam konteks PT X mencakup tidak hanya integrasi antarmodul sistem, tetapi juga integrasi antara jalur digital dan jalur fisik dalam satu prosedur pembelian yang sama. Apabila dibaca melalui lensa contingency theory dan agency theory sekaligus, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal pada organisasi dengan sistem ERP internal seperti PT X tidak dapat diukur semata dari tingkat digitalisasinya. Justru, efektivitas tersebut ditentukan oleh sejauh mana rancangan sistem, baik digital maupun fisik yang mampu menyesuaikan diri dengan kontingensi eksternal yang dihadapi perusahaan, sembari tetap menjaga fungsi monitoring dan bonding yang disyaratkan dalam hubungan keagenan antara manajemen, unit operasional, dan pihak eksternal seperti vendor dan auditor

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ERP diimplementasikan dalam siklus pengadaan di unit purchasing PT X serta perannya dalam mendukung pengendalian internal perusahaan, ditinjau melalui perspektif contingency theory dan agency theory berdampingan dengan kerangka COSO (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelian PT X berjalan melalui alur yang terintegrasi dalam sistem ERP, melibatkan beberapa unit dengan peran dan kewenangan yang berbeda di setiap tahapannya.

Dalam praktiknya, sistem ERP PT X tidak berjalan secara sepenuhnya digital karena sebagian prosedur administrasi masih menggunakan dokumen fisik. Kondisi hybrid ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sistem, melainkan merupakan bentuk penyesuaian rasional terhadap kontingensi eksternal perusahaan sebagaimana dijelaskan contingency theory. Serta kebutuhan menjaga fungsi monitoring dan bonding antara manajemen, unit operasional, dan pihak eksternal sebagaimana dijelaskan agency theory. Dokumen fisik tetap dibutuhkan sebagai bukti otentik untuk kepentingan audit, pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila ditinjau melalui kerangka COSO (2013), kelima komponen pengendalian internal terpenuhi melalui kombinasi sistem ERP dan dokumen fisik, sehingga efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh tingkat digitalisasi sistem, tetapi juga oleh konsistensi pengguna dalam menjalankan prosedur di kedua sisi, baik digital maupun fisik.

Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan dengan sistem ERP yang dikembangkan secara internal, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kondisi hybrid serupa pada perusahaan dengan skala dan jenis industri yang berbeda, menggunakan pendekatan contingency theory dan agency theory secara lebih formal, atau membandingkan efektivitas pengendalian internal antara perusahaan yang telah sepenuhnya digital dengan yang masih menjalankan sistem hybrid.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshaiti, H. (2023). Influences of Internal Control on Enterprise Performance: Does an Information System Make a Difference? *Journal of Risk and Financial Management*, 16(12), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/jrfm16120518>

- Ammar, S. F. (2025). Unveiling the rivalry of cloud ERP dialectics, underpinning logics and roles of accounting and information system professionals. *International Journal of Accounting Information Systems*, 56, 100728. <https://doi.org/10.1016/J.ACCINF.2025.100728>
- Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society*, 28(2–3), 127–168. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(01\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7)
- COSO. (2013). *Integrating the triple bottom line into an enterprise risk management program*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fitriani, A., Mahsina, & Rahman, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembelian Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada Perusahaan Kertas PT. X). *UBHARA Accounting Journal*, 2(1), 1–9. Retrieved from <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Hall, J. A. (2008). *Accounting information systems* (6th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publication.
- Najwa, A., Puspitasari, D. A., Rosepandanwangi, D., Hasnatha, V. L., Zhafran, Aprillia, N. T., & Sherlinda, F. (2025). Analysis of the Implementation of the Purchasing Accounting System and Internal Control at the Hikmah Stationery Store. *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.61656/sbamr.v7i2.280>
- Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413–428. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(80\)90040-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90040-9)
- Pahutar, I., & Sari, N. M. (2025). Analysis of the Implementation of Purchasing Information System Based on Enterprise Resource Planning (ERP) Using Microsoft Dynamics Nav Application (Case Study of PT. Simpang Kanan Lestarindo). *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(2), 504–508. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4550>.
- Rahmawati, T., & Yustian, Y. (2022). Analisis Dampak Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Internal. *JRKA*, 8(1), 62–69.
- Rapina, R., & Mustamin, N. I. P. (2024). Integrating Internal Control and User Competence: Enriching Accounting Information System Quality. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 236–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v16i2.9598>

- Romney, M. B., Steintbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.).
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., ... Amane, A. P. O. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Virgantara, & Lisdiono. (2025). Evaluation of the Implementation of Internal Control in the Business Processes of Public Appraisal Firm JD Using COSO (2013). *E-Jurnal Akuntansi*, 35(8).
<https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p19>